

PENERAPAN FUNGSI PEMBINAAN CAMAT TERHADAP APARATUR DESA DI KECAMATAN GALELA BARAT

Oleh

RIZALDY DJOREBE

ABSTRAK

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti yang dikatakan oleh Prof.Koeswara Kertapradja, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tuga-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Sedangkan dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya adminstrasi tata pemerintahan yang baik.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa di Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara dengan uraian sebagai berikut: 1 Untuk mengetahui penerapan pembinaan Camat terhadap aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Galela Barat. 2. Untuk mendapatkan pelaksana penerapan fungsi pembinaan terhadap aparatur pemerintah Kecamatan Galela Barat.

Maksud yang terkandung di dalam pembinaan camat sendiri adalah bagaimana camat bisa memposisikan dirinya dengan baik di tenga-tenga masyarakat dan aparaturpemerintah desa dalam memberikan pedoman dan pembinaan, arahan serta bimbingan kepada aparatur pemerintah desa sehingga mampu menerima kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah di kecamatan Galela Barat sebagai anggota masyarakat yang akan menjadi pelopor pembangunan di hari depan bangsa, maka masyarakat di tuntut untuk menjadi kewajibannya sebagai mitra kerja dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mengsucceskan setiap pembangunan yang ada khususnya di kecamatan Galela Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang

dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air.

Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditunjukkan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi, daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa Negara memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara structural, fungsional dan cultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi camat.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti yang dikatakan oleh Prof.Koeswara Kertapradja, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Sedangkan dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penulisan di atas, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah.

Bagaimana penerapan fungsi pembinaan Camat terhadap aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Galela Barat

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa di Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara dengan uraian sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerapan pembinaan Camat terhadap aparatur pemerintah Desa di Kecamatan Galela Barat.

Untuk mendapatkan pelaksana penerapan fungsi pembinaan terhadap aparatur pemerintah Kecamatan Galela Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif kearah pengembangan pendidikan khususnya bagi pembangunan aparatur pemerintah desa.

Untuk menambah pengetahuan tentang masalah yang berhubungan dengan penerapan fungsi Pembinaan pemerintah Kecamatan terhadap aparatur Pemerintah Desa.

b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran baik pihak-pihak yang berkepentingan baik Pemerintah Kecamatan, maupun Pemerintah Desa serta masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Galela Barat.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep Pembinaan

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai Kepala Wilayah seperti pada waktu lalu.

B. Konsep Camat

Camat menurut *Bayu Suryaningrat (1981:2)* adalah seorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintah. Seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu mengendalikan pembangunan.

C. Konsep Pemerintah

Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah Menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat Menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintahan dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (dalam Haryanto dkk, 199:73)

D. Konsep Aparatur Pemerintah

Secara etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, instansi, pegawai negeri Poerwadarminta W.J.S.(1993 : 165). Sedangkan aparatur yakni disamakan, artinya dengan aparatur tersebut di atas, yakni dapat diartikan sebagai alat Negara, aparatur pemerintah.

Jadi aparatur Negara, alat kelengkapan Negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tapi juga organisasi fasilitas ketentuan pengaturan dan sebagainya. Adapun jenis-jenis aparatur sebagaimana dikemukakan oleh Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, (1993:83-86)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang di laksanakan dengan menggunakan metode *survei* dimana akan di ambil sebagai populasi atau sebagian penduduk yang ada di Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara yang tersebar di beberapa desa.

Metode deskriptif yang juga di sebut penelitian taksanomik yang di maksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah Variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang menjadi fokus penelitian.

Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Memusatkan perhatian pada masalah aktual yang sedang terjadi baik yang bersumber dari masyarakat pada umumnya maupun yang bersumber pada masyarakat yang di jadikan sebagai responden (koentjara Ningrat 1983). Dengan tujuan data ini dapat mengungkapkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan pemerintah camat terhadap aparatur pemerintah desa.

- 2) Menggambarkan fakta-fakta yang di selidiki dan diikuti dengan interpretasi secara rasional atas berbagai temuan lapangan sekaligus menganalisa keterkaitan antar Variabel penelitian secara sistematis dan kritis.

B. Informan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan berdasarkan hasil *survei* dilapangan dimana berbagai macam informasi yang diselidiki berkaitan dengan fungsi penerapan camat yang ada di kecamatan Galela Barat tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat yang ada di kecamatan tersebut dengan hasil itulah penulis mengadakan penelitian di instansi yang ada di kecamatan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit analisis yaitu objek yang menjadi fokus penelitian, objek penelitian juga disebut sebagai unit analisis, pada umumnya berbentuk orang sebagai individu atau dapat berupa satuan tertentu seperti kelompok masyarakat tertentu, kelompok masyarakat desa, kelompok masyarakat kecamatan, kota (Irawan, 1995).

Dalam penelitian populasi yang dimaksud adalah masyarakat penduduk di beberapa desa di Kecamatan Galela Barat Kab. Halmahera Utara.

Yang masing-masing akan di ambil sampel diantaranya:

- Camat dan Sekcam Galela Barat
- Pemerintah Desa 10 orang
- Pegawai pemerintah kecamatan 4 orang
- Tokoh Masyarakat 15 orang
- Tokoh Pemuda dan beberapa Masyarakat lainnya 10 orang

Dari penentuan sampel desa tersebut diatas, maka dapat di tetapkan sampel responden. Jumlah sampel yang efektif sebagai responden direncanakan 39 responden.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua variable, yaitu Variabel Independent (variabel bebas) dan Variabel Dependent (variabel terikat) yang

menjadi variabel Independent adalah penerapan pemerintah camat dan Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa

E. Fokus Penelitian

Adapun Fokus penelitian ini yaitu bagaimana penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa. Karena sampai sejauh ini pemerintah kecamatan belum menerapkan fungsi secara maksimal, dengan dasar ini penulis hanya meneliti bagaimana fungsi pembinaan camat yang ada di kecamatan Galela Barat., maka penelitian ini lebih di fokuskan pada masalah yang sedang terjadi

F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden penelitian, serta data yang di jajahi melalui wawancara interview dan observasi langsung dilapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai studi dokumenter di instansi-instansi yang ada kaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan daftar pertanyaan terbuka. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik pencatatan yang dikumpulkan dengan tiga cara pengumpulan data yaitu:

1. Daftar pertanyaan.
2. Pengamatan langsung.
3. Wawancara (interview).

G. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan cara prosentatif yang disajikan dalam tabel frekuensi yaitu:

1. Mendeskripsikan fakta-fakta secara lengkap dengan aspek yang diselidiki.
2. Mengemukakan hubungan satu dengan yang lain dari aspek-aspek yang diselidiki
3. Memberi bobot dengan penafsiran yang memadai terhadap fakta-fakta yang ditemukan serta memberi makna pada setiap data.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. FUNGSI PEMBINAAN CAMAT DI KECAMATAN GALELA BARAT

Pada hakekatnya fungsi pembinaan camat merupakan yang tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh Bupati untuk di laksanakan dalam wilayah kecamatan.

Sesuai dengan strategi pembangunan masyarakat yang di kembangkan dan di arahkan sebagai aktor pejuang bangsa dan pembangunan nasional, antara lain perlu di berikan pendidikan kepemimpinan dalam hal ini kepemimpinan pancasila, yang adalah suatu kenyataan sikap masyarakat selalu mempunyai kekuatan dan kelemahan sendiri yang di bawah oleh pengaruh lingkungan dan keadilan sosial ekonomi dan politik pada saat tertentu.

Yang terpenting dari fungsi pembinaan camat itu sendiri adalah adanya koordinasi serta kerja sama yang di lakukan oleh setiap lembaga atau aparat pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dapat di jalankan dan di laksanakan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri.

Sehingga demikian akan menciptakan suatu masyarakat yang beradab, di mana dapat menunjang setiap program-program dan kegiatan-kegiatan demi terciptanya suatu pembangunan yang adil dan merata di segala bidang.

Sangat di harapkan agar aparatur pemerintah desa benar-benar harus berperan secara aktif dalam menyukseskan setiap agenda-agenda yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Melalui hasil wawancara dengan Camat Galela Barat mengenai hal tersebut diatas, Drs. Hlil Talaba, beliau mengatakan : *dalam pengambilan kebijakan yakni dalam pembinaan aparat pemerintah desa, saya selalu melibatkan masyarakat, seperti meminta masukan, saran atau kritikan, bertanya kekurangan serta kelebihan dari aparat pemerintah desa setempat, sehingga saya dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak menimbulkan polemic dimasyarakat.*

Pernyataan pak Camat diatas, didukung oleh seorang tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Galela Barat yakni Bapak Rohmat T, beliau mengatakan : *Dalam pembinaan aparat desa, bapak camat sering melibatkan kami masyarakat, yang ada di desa-desa yang ada di Kecamatan Galela Barat, beliau sering meminta masukan dari kami, mengenai keluhan juga kira-kira kekurangan apa yang ada di masing-masing*

desa. Sehingga bapak bias membina aparat desa yang dirasa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal senada juga dikatakan Tokoh Pemuda di Kecamatan Galela Barat, Pemuda Rochim K, dia mengatakan : dalam meminta masukan dari masyarakat, bapak camat juga tidak segan-segan bertanya kepada kami generasi muda untuk kemajuan kecamatan galela barat, khususnya dalam pembinaan aparat pemerintah desa, guna pelayanan yang lebih baik.

Menurut Bapak Rojak P seorang masyarakat di Galela Barat, mengatakan, *menurut saya pembinaan camat kepada aparat pemerintah di desa-desa telah berjalan dengan dengan baik, camat sering terlihat berbincang-bincang dengan aparat desa dalam berbagai kesempatan, baik di acara-acara maupun pada saat bertemu di jalan.* Penulis juga mewawancarai bapak Max, seorang aparat desa di Kecamatan Galela, beliau mengatakan : *Dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pembinaan aparat, bapak camat saya nilai cukup baik, dimana kami sering mengikuti rapat-rapat di kecamatan yang dipimpin oleh bapak camat, biasanya untuk menilai hasil kerja kami ataupun untuk memberikan pengarahan dan pembinaan dalam berbagai hal. Sering juga kami menerima nasihat dari bapak camat, bagaimana harus bekerja dan melayani masyarakat dengan baik.*

Penuturan diatas, lebih diperkuat seorang kepala desa yang ada di Kecamatan Galela Barat

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di lapangan memang perilaku aparatur pemerintah desa dan kecamatan Galela Barat sangat baik walaupun ada beberapa aparat desa yang tidak menjalankan tugas fungsi dan tanggung jawab dengan baik. Bapak Mario K beliau mengatakan :*Kami sebagai aparat desa wajib mengikuti arahan yang dikatakan oleh camat, menurut saya, selama menjabat sebagai kepala desa, saya sering diberikan pembinaan oleh bapak camat, bukan cuma saya, tapi juga kepala-kepala desa yang lain, kami sering mendapatkan pembinaan dari bapak camat, baik dalam beberapa kesempatan di acara-acara maupun dalam rapat di kecamatan. Hal ini sangat membantu kami dalam menjalankan tugas kami sebagai aparat pemerintah yang berhadapn langsung dengan masyarakat. Saya memberika apresiasi kepada camat Galela Barat dalam hal pembinaan kepada kami telah menjalankannya dengan baik.*

B. PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN GALELA BARAT .

Salah satu tujuan pembinaan adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi aparatur pemerintah desa, hal ini berarti bahwa hasil dan pembinaan camat adalah di mana aparatur pemerintah desa dan masyarakat berperan serta dalam pembinaan yaitu ikut sertanya masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam merencanakan, menentukan, melaksanakan tujuan pembinaan dan akhirnya menikmati terwujudnya tujuan-tujuan yang telah di rencanakan.

Kegiatan pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa tercakup dalam konsep pembinaan yaitu camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh Bupati/Walikota untuk di laksanakan dalam wilayah kecamatan.

Cara untuk pembinaan di ukur intesitasnya adalah bagaimana pembinaan camat bisa melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi secara menyeluruh dan kontinyu dalam pembinaan yang diberikan.

Keadaan inilah harus ada di kecamatan Galela Barat, di mana harus ada upaya-upaya dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembinaan.

Hasil diatas, didukung juga dengan hasil wawancara oleh Camat Galela Barat, beliau mengatakan : *Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, perlu adanya aparat pemerintah yang berkualitas dan tahu cara melayani masyarakat, peran masyarakat sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut. Kami selaku pimpinan kecamatan telah melakukan berbagai upaya melibatkan masyarakat berpartisipasi secara menyeluruh, yakni saya sering menghimbau masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah kecamatan untuk melaporkan aparat yang bekerja kurang baik ataupun menegurnya secara langsung.*

Dengan adanya peran dari masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu dalam pembinaan aparat pemerintah desa, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dari Penerapan fungsi pembinaan camat terhadap pemerintah desa, maka berikut ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari pembahasan serta mengajukan saran.

A. Kesimpulan

1. Penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur pemerintah desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistim pemerintahan yang efektif.
2. Aparatur pemerintah desa mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan dan merupakan dinamisator dan stabilitator serta merupakan suri teladan bagi masyarakat. Untuk itu dalam mencapai suatu sistim pemerintahan yang tertib dan efektif sangat bergantung pada aparatur pemerintah tersebut, peran camat sebagai perangkat daerah tertinggi di kecamatan sangat diperlukan dalam hal ini, yakni memberikan pembinaan.

B. Saran

1. Camat sebagai top leader di kecamatan hendaknya mampu menjadi pemimbing dan pembina bagi aparatur pemerintah kecamatan untuk bergotong-royong mengoptimalkan peran dan kinerja dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.
2. Perlu membangun komunikasi yang baik antar semua pihak, baik pimpinan maupun instansi-instansi vertikal dan otonom agar tercipta keserasian dalam menjalankan setiap program dan kinerja yang ada.